

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari informasi SiLPA APBD dan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten di Indonesia dengan menggunakan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan perhitungan jumlah total pendapatan pemerintah dikurangi dengan belanja pegawai.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan data seluruh pemerintah daerah kabupaten yang terdapat di Indonesia dengan kriteria memiliki Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD. Jumlah pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi tersebut dan digunakan dalam penelitian ini adalah 393 pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI Tahun 2012. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat SPSS (*Statistical Package for The Social*) versi 21.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi SiLPA dan informasi arus kas operasional, investasi, serta pembiayaan berpengaruh pada penganggaran belanja modal pemerintah daerah klaster b. Pada pemerintah daerah klaster a, hanya variabel informasi arus kas pembiayaan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster c, semua variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

Kata kunci: Informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, Penganggaran Belanja Modal, Klaster Pemerintah Daerah.